

EVALUASI PROGRAM RASKIN DI KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Unggul Wicaksono, Ari Subowo, Aufarul Marom

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum
Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)
7465405

Laman <http://www.fisip.undip.ac.id> email
fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Raskin program goal is to reduce the burden of Poor Households expenditure by fulfilling most basic food needs in rice while the goal of the program is to increase access Raskin food to poor families to meet basic needs in order to strengthen household food security and prevent further loss of energy and protein consumption.

Expectations of the program is that poor people do not have a shortage of food, thus their welfare would be slightly guaranteed, turns in the implementation of this program would occur Raskin many problems, including the problem in terms of misses the point, not the right quantity, right quality is not, and is not appropriately priced. Apart from the administrative side also found a problem that delays the advent of depositing the proceeds of the purchase of rice to bulog.

Keywords: evaluation of policies, raskin programs.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara agraris yang kaya akan alam dan hasil bumi. Seharusnya bisa memberikan ketersediaan pangan yang cukup bagi segenap Bangsa Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak rakyat miskin yang menderita karena kelaparan. Untuk itulah pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pangan bagi penduduk miskin melalui Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang dimulai Januari 2002 yang merupakan lanjutan dari program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dirancang pemerintah dan dilaksanakan oleh Bulog (pertengahan 1998). Program Raskin adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan bagi keluarga miskin. Raskin merupakan salah satu bagian dari Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKS-BBM). Harapan dari program ini adalah agar penduduk miskin tidak mengalami kekurangan pangan, dengan demikian kesejahteraan mereka pun akan sedikit terjamin, ternyata dalam pelaksanaan program Raskin ini justru terjadi banyak persoalan, diantaranya adalah masalah dalam hal tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat kualitas, dan tidak tepat harga. Selain itu dari sisi administratif juga ditemukan masalah bahwa munculnya keterlambatan penyetoran uang hasil pembelian beras kepada bulog. Jika dilihat sepintas seolah-olah masalah tersebut adalah masalah distribusi, namun jika dilihat secara mendalam masalah telah muncul sejak sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan tidak optimal telah menimbulkan cara pandang yang salah tentang program Raskin. Pada tahap yang lain, yaitu pendataan, ada bukti yang cukup kuat bahwa cara dan hasil indentifikasi penerima manfaat kurang dapat diterima oleh masyarakat setempat. Demikian juga halnya dengan masalah distribusi, khususnya dari titik distribusi terakhir kepada penerima manfaat, terjadi banyak masalah. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan di satu sisi dan protes dari masyarakat luas di sisi lain. Memandang hal diatas dimana program beras untuk keluarga miskin yang diharapkan agar masyarakat miskin tidak mengalami kekurangan pangan dan membuat kesejahteraan mereka bisa sedikit terjamin. Tetapi ternyata dalam pelaksanaannya justru program Raskin banyak terjadi persoalan dan penyimpangan. Pelaksanaan program raskin tidak berpedoman penuh pada prosedur program karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa

senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan harapan dapat memaparkan hasil telaah dan dapat diambil sebagai pemecahan masalah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagai lokasi penelitian adalah keterbatasan daya jangkauan peneliti dan kemudahan memperoleh akses data. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian: **“EVALUASI PROGRAM RASKIN DI KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG”**.

B. TUJUAN

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Meneliti pemahaman masyarakat sasaran Program Raskin mengenai program yang sedang berlangsung.
2. Mengetahui pelaksanaan program raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul.
3. Mengetahui bagaimana dampak Program Raskin terhadap beban konsumsi Rumah Tangga.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Dimensi Dampak Program

D. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami program beras untuk keluarga miskin kelurahan Muktiharjo Kidul Kota Semarang.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pemahaman Masyarakat Terhadap Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Pemahaman masyarakat terhadap program Raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan kewajiban secara moral pada masyarakat penerima manfaat Raskin demi lancarnya pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul, sesuai dengan pedoman umum raskin, secara garis besar masyarakat miskin penerima manfaat Raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai program Raskin.

Pelaksanaan Program Raskin yang dilakukan Oleh Kelurahan Muktiharjo Kidul

Penyelenggaraan program Raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul belum memenuhi enam indikator keberhasilan program Raskin yang terdapat dalam pedoman umum program Raskin tahun 2011, hal tersebut dapat di tunjukkan pada indikator keberhasilan program Raskin yang meliputi:

- Ketepatan sasaran

yaitu cara pembagian beras dilakukan dengan sistem bagito, karena data yang terhimpun di kelurahan tidak sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat, sehingga akan berdampak pada ketepatan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat Raskin.

- Ketepatan Jumlah

Jumlah raskin yang diperoleh masyarakat penerima raskin tidak sesuai dengan pedoman umum raskin, masyarakat sasaran program raskin hanya menerima jatah beras sebesar 3-4 kilogram per KK setiap bulannya, sedangkan menurut pedoman umum raskin tahun 2011 penerima raskin memperoleh jatah per KK sebesar 15 kilogram tiap bulannya

- Ketepatan Harga

Harga raskin yang beredar di masyarakat ternyata mengalami ketidaksesuaian seperti apa yang ada pada pedoman umum raskin 2011 yakni sebesar Rp. 1.600 per kilogram, harga yang ditebus mereka untuk menebus melalui pengurus dilingkungan RT adalah sebesar Rp. 1.800-2.000. Padahal menurut pedum raskin 2011 harga Rp.1.600 merupakan harga yang diberlakukan kepada seluruh wilayah di Indonesia dengan kondisi lingkungan geografis yang berbeda, jika ada kendala transportasi pun seharusnya tidak menaikkan harga melebihi dari apa yang telah ditetapkan.

- Ketepatan Waktu

Pendistribusian beras berlangsung tanpa kepastian waktu, beras dapat ditebus oleh penerimanya diatas tanggal sepuluh setiap bulannya, bahkan dari pihak kelurahan juga tidak bisa memastikan kapan beras datang tiap bulannya.

- Ketepatan Kualitas

Kualitas beras yang buruk dan tidak layak konsumsi juga dirasakan oleh masyarakat penerima raskin, meskipun dalam pedoman umum raskin 2011 tidak ada secara terperinci yang menjelaskan tentang bagaimana kualitas beras yang layak konsumsi atau layak pangan.

- Ketepatan Administrasi

Administrasi yang tidak tertib terjadi pada pelaksanaan raskin tiap bulannya, pembayaran rumah tangga sasaran

untuk menebus beras biasa dilakukan dengan cara hutang sampai memperoleh uang untuk membayarnya, hal tersebut menyebabkan pihak RW juga terlambat dalam penyetoran ke kelurahan, sehingga kelurahan juga terlambat menyetor uang hasil penjualan raskin kepada bulog.

Dampak Program Raskin Terhadap Beban Konsumsi Rumah Tangga

Dampak dari program Raskin di Kelurahan Muktiharjo Kidul menunjukkan adanya perbaikan dalam meringankan beban keluarga miskin, hal tersebut dibuktikan dengan harga beras dipasaran yang harganya lebih tinggi, masyarakat masih bisa membeli beras murah, artinya bahwa, sisa dari pembelian beras Raskin dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya, hal tersebut menjadikan penerima raskin yang telah terdaftar maupun masyarakat yang merasakan dampak dari penerapan sistem bagito menghendaki keberlanjutan program raskin, dimana secara langsung mereka sudah merasa ketergantungan terhadap program raskin yang diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Program raskin yang terselenggara di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, belum sesuai Pedoman Umum Raskin 2011.

B. Rekomendasi

1. Perlunya penambahan frekuensi sosialisasi program Raskin baik kepada masyarakat penerima manfaat Raskin maupun petugas distribusi agar memahami tentang hak dan kewajiban dari penerima program Raskin adanya peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antar

lembaga pemerintah penentu kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat Raskin.

2. Verifikasi data jumlah penerima raskin harus segera ada pembaharuan secara cepat apabila terjadi perubahan, baik penambahan maupun kematian/perpindahan penduduk.

3. Pelaksana program raskin yang ada pada RT atau RW hendaknya menjual beras miskin sesuai dengan ketentuan yang ada pada pedoman umum raskin 2011

4. Pedoman umum raskin seharusnya menyertakan kapan waktu pendistribusian beras (tanggal) tiap bulannya, padahal pada pedoman umum raskin disebutkan tentang ketepatan waktu.

5. kualitas beras miskin menurut penerimanya memang sangat buruk, pemerintah juga memfasilitasi dalam hal penukaran jika ada beras yang buruk, tetapi menurut pedoman umum raskin 2011 tidak dijelaskan terperinci tentang bagaimana seharusnya beras yang akan diterima oleh penerimanya. Bulog seharusnya menyertakan bagaimana kualitas beras miskin yang layak untuk konsumsi masyarakat.

6. Petugas dari RT atau RW seharusnya tidak melakukan penjualan dengan cara hutang, jika sekali saja petugas memberikan toleransi kepada penerima raskin maka, akan terus meluas kebiasaan seperti itu, hingga tertib administrasi yang ditetapkan bulog, penyetorannya dilakukan minimal seminggu setelah beras terdistribusi

7. Jika program raskin dapat memenuhi ke 6 indikator yang ditetapkan oleh bulog, maka beban pengeluaran masyarakat miskin akan secara maksimal dapat dikurangi melalui program raskin tersebut.

8. Keberlanjutan program raskin juga perlu dilakukan supaya tujuan dari program raskin dapat tercapai dan harus

dibarengi dengan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan.

9. BPS seharusnya secara objektif dan lebih teliti dalam menetapkan penduduk berkategori miskin, sehingga semua masyarakat miskin terdaftar sebagai rumah tangga sasaran program raskin, sehingga tidak ada kecemburuan maupun konflik sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: Edisi Kedua: Gadjah Mada University Press

Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Evaluasi Kualitatif, cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*: Edisi Revisi: PT. Remaja Rosda Karya

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang: PT Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Pedoman Umum penyaluran Raskin 2012

www.Bulog.co.id

www.bpskotasemarang.go.id